

KATEGORI

Sosial

SUB KATEGORI

Kesejahteraan Sosial

NAMA INDIKATOR

PGOT dan WTS belum punya shelter (Rumah Singgah)

TAHUN

2017

KONSEP

- **PGOT dan WTS belum punya shelter (Rumah Singgah)** adalah Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar serta Wanita Tuna Susila yang belum menempati tempat tinggal sementara.
- **PGOT** adalah Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar.
- **Pengemis** adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain di jalanan atau di tempat-tempat umum lainnya.
- **Gelandangan** adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan kehidupan normal yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum serta mengganggu Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.
- **Orang Terlantar** adalah orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial.
- **WTS** adalah Wanita Tuna Susila.
- **Tuna Susila** adalah orang yang mengadakan hubungan seksual tanpa didasari dengan perkawinan yang sah dengan mengharapkan imbalan/upah sebagai balas jasa dan mengganggu ketertiban umum.
- **Rumah Singgah** adalah suatu tempat tinggal sementara bagi penerima pelayanan yang dipersiapkan untuk mendapat pelayanan lebih lanjut.

RUJUKAN

Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban, Kebersihan, Dan Keindahan

RUMUS

WALI DATA

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberday

UKURAN

Jiwa

UNIT

Kepala Dinas Sosial

KEGUNAAN

Untuk mengetahui PGOT dan WTS yang belum punya shelter (Rumah Singgah).

INTERPRETASI

Tempat tinggal sementara yang diperuntukkan bagi PGOT dan WTS bertujuan agar PGOT dan WTS mendapat pelayanan lebih lanjut. Adanya rumah singgah tersebut, akan meningkatkan pelayanan dan penanganan terkait permasalahan yang timbul akibat adanya PGOT dan WTS.

**KETERANGAN
SUMBER
METODOLOGI
KEDALAMAN DATA**

Kabupaten, Provinsi, Nasional

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

Bagian Hukum

DOKUMEN

LKPJ

